

2026



RENJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BOGOR**





BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah,
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987),

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224),

- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462),
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139),
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114),
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419),
- 30 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361),

31. Peraturan ...

- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435),
- 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262),
- 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13),
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119),
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128),
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129),
- 37 Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
5. Bupati adalah Bupati Bogor
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

10 Desa ...

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD,
25. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
27. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

29 Kegiatan ...

- 29 Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 30 Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 merupakan pedoman rencana Perangkat Daerah sesuai kewenangan bidang urusan/unsur, tanggung jawab dan fungsi.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- (5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dalam SIPD.
- (6) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
- (7) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,
- b Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
- c pendanaan dan sumber pendanaan, dan
- d dukungan terhadap prioritas nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2026

Pasal 5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 memedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026, serta Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan,
 - b terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/ kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah,
 - c terjadi ...

- c terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja, dan
 - d terjadi perubahan Renstra PD,
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

Pasal 7

Perubahan Renja PD disusun dengan tahapan:

- a penyusunan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2026,
- b perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2026, dan
- c penetapan perubahan Renja PD Tahun 2026

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD,
- (3) Isi perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Bappedalitbang
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026
- (4) Kepala ...

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya

BAB VI

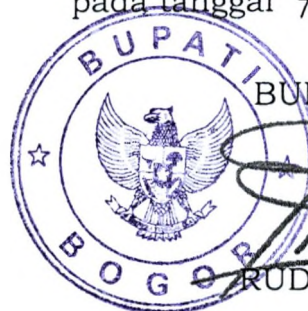
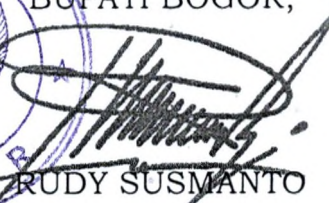
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025


BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

AJAT ROCHMAT JARNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena berkat Rahmat-Nya, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja ini menyajikan Perencanaan yang memuat kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD yang pada akhirnya dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD dan menjadi acuan perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor.

Diharapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini dapat menjadi dokumen Perencanaan Tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan Daerah



Dr. Bambam Setia Aji, ST., M.BA
NIP. 19730501 200501 1 009

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.....	3
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	15
HASIL EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.....	15
2.1 Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor.....	74
BAB III.....	97
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG.....	97
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	97
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.....	100
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	101
BAB IV.....	102
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG.....	102
BAB V.....	115
P E N U T U P.....	115

LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR	24 TAHUN 2025
TANGGAL	7 AGUSTUS 2025
TENTANG	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

**RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 disusun secara simultan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Disamping itu, Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2026 menjadi bagian dari tahapan "fondasi" periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, yang telah dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, substansi Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2026 telah memedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program-program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, serta tujuan dan sasaran daerah, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perencanaan.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja; dan

6. Penetapan Renja.

Khususnya dalam tahap kelima, perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disinkronisasikan dengan substansi yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;

39. Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jawa Barat adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jawa Barat adalah Pergub Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12)
45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12)
46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Adapun **tujuan** disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam mencapai target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah Tahun 2026.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Tahun 2026.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang terdapat pada masing-masing bab.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini, hal-hal yang wajib ada adalah:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Renja Bapperida Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Tujuan disusunnya Renja adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2026.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang terdapat pada masing-masing bab.

Secara umum Bab II memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor.

Bab ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan 5 tahun sebelumnya, sehingga tahun 2024 (2020-2024) sebagaimana format tabel 2.1 terlampir. Disamping itu, data yang harus disajikan dalam dokumen adalah indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tercapai, terlampaui dan tidak tercapai. Jika terlampaui dan tidak tercapai, wajib menyertakan alasan. Untuk target yang tidak tercapai, wajib menyertakan upaya yang akan dilaksanakan untuk tahun 2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

menginformasikan pencapaian kinerja perangkat daerah, dengan rincian:

- Penjelasan naratif ketercapaian IKU tujuan dan sasaran (impact) Tahun 2022 antara target dengan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian IKU (tujuan dan sasaran) Tahun 2024 terhadap capaian Tahun 2023, jika memiliki IKU yang sama.
- Penjelasan naratif ketercapaian target kinerja program (outcome) Tahun 2024 antara target dengan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian outcome Tahun 2024 terhadap capaian Tahun 2023 jika memiliki outcome yang sama.

Penjelasan dimaksud, dituangkan pada Tabel 2.2 dengan format sebagaimana terlampir.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

Bagian ini mengulas/menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Dalam hal ini, menguraikan kinerja program yang perlu ditingkatkan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah, karena belum mencapai target.
- Uraian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam hal ini uraikan rumusan permasalahan dalam bentuk poin.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dalam hal ini, uraikan poin isu strategis perangkat daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal Renja PD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja PD, misalnya: terdapat rumusan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program/kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda Dituangkan pada Tabel 2.3 dengan format sebagaimana terlampir.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Berisi hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan, yang terkait dengan kewenangan perangkat daerah. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dituangkan pada Tabel 2.4 dengan format sebagaimana terlampir.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisi telaahan keterkaitan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional (asta cita) serta Provinsi Jawa Barat (salapan langkah) dengan kewenangan (perangkat daerah), dengan menyinergikan antara program-program yang tengah disusun dalam Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2025-2029, sebagaimana format Tabel 3.1 dan 3.2 terlampir. Perhatikan pula keterkaitan pelaksanaan kewenangan perangkat daerah dengan substansi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, sebagaimana format Tabel 3.3 terlampir.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah beserta indikatornya sebagaimana telah tercantum dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai format Tabel 3.4.

Sebagai penjelasan, tujuan perangkat daerah adalah apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahunan,

sebagai implementasi dari sasaran daerah. Adapun sasaran perangkat daerah adalah implementasi tujuan tahunan perangkat daerah yang akan dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan, serta menghasilkan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

- Disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam SIPD.
- Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 .
- Berorientasi pada pencapaian kinerja perangkat daerah serta kebijakan nasional yang ditetapkan untuk daerah melalui pelaksanaan kewenangan perangkat daerah.

Tercantum sebagaimana format tabel 3.5 terlampir.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan dan menguraikan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024 berdasarkan:

- a. Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
- b. RKPD Tahun 2026 (Renja PD memedomani substansi sebagaimana tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026)

Dituangkan pada Tabel 4.1 dengan format sebagaimana terlampir.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada penyusunan Renja tahap selanjutnya, termasuk pedoman untuk penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

2.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Secara nomenklatur masih Bappedalitbang) Kabupaten Bogor memiliki 1 (satu) Tujuan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan 3 (tiga) sasaran yang harus diwujudkan, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan daerah; (2) Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan daerah; dan (3) Meningkatnya hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2024 melaksanakan 4 (empat) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 87 (delapan puluh tujuh) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 43.487.646.854 (empat puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan **Realisasi anggaran sebesar** Rp. 42.782.098.802 (empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan telah mencapai nilai Rata-rata capaian kinerja outcome sebesar 100% maka termasuk dalam kriteria penilaian sangat tinggi dan Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Anggaran SKPD sebesar 98,37%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	%	100						
	Penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)	Tersedianya pedoman dokumen RKPD Tahun 2020	Dokumen	1						
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten	Terpublikasinya rencana pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan	Perangkat Daerah	72						
	Penyusunan pedoman dan fasilitasi penyelenggaraan musrenbang RKPD di Kecamatan	Tersedianya usulan perencanaan yang bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan RKPD di tingkat kecamatan	Dokumen	1						
	Penyusunan perencanaan pembangunan berjangka	Tersedianya Dokumen berjangka kabupaten bogor sebagai acuan perencanaan pemabngunan	Dokumen	2						
	Penyusunan pedoman dan fasilitasi perencanaan pendanaan pembangunan	Tersedianya pediman perencanaan pendanaan pembangunan kabupaten bogor	Bulan	12						
	Perencanaan pembangunan berbasis tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)	Tersedianya data/informasi pelaksanaan TJSL di Kabupaten Bogor	Dokumen	3						
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	%	100						
	Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah	tersedianya data pada SIPD online kemendagri sebagaimana amanat permendagri 8/2014	Kelompok Data	8						
	Pengembangan dan pengelolaan SIMPEL/SIMRAL	Terpaduserasinya penganggaran kabupaten	Perangkat Daerah	72						
	Pengembangan dan pengelolaan CYBORG	Tersedianya sistem multifungsi	Sistem	2						
	Penyusunan data pokok perencanaan pemabngunan daerah	Tersedianya dokumen data pokok dan infomasi perencanaan pemabngunan	Dokumen	1						
	PROGRAM EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	%	90						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	terpenuhinya pelaporan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah	Dokumen	1						
						Evaluasi hasil perencanaan pembangunan berjangka	terevaluasinya dokumen perencanaan berjangka kabupaten bogor	Jenis	3						
						evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan kabupaten bogor	terevalasinya hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	4						
						Evaluasi hasil perencanaan pendanaan pembangunan non APBD	Tersusunnya dokumen evaluasi pendanaan non APBD	Dokumen	2						
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan	11						
						Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup pendidikan tenaga kerja, pemuda dan olahraga	terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang pendidikan, tenaga kerja, pemuda dan olahraga sebagai acuan perencanaan jangka panjang	Dokumen	1						
						penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup kesehatan dan sosial	terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang kesehatan dan sosial sebagai acuan perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen	1						
						penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup pemerintahan	terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang pemerintahan sebagai acuan perencanaan tahunan jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen	1						
						penanganan kemiskinan daerah (TKPKD)	rekomendasi solusi percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten bogor	Dokumen	1						
						Penyusunan rencana induk bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah sektor keolahragaan sebagai bahan acuan pelaksanaan program/kegiatan sektor keolahragaan	Dokumen	1						
						Penilaian anugrah pancaniti apik	Terpenuhinya perencanaan pembangunan tingkat desa yang baik	Dokumen	1						
						Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup pendidikan, tenaga kerja, pemuda dan olahraga	Tersedianya dokumen pengndalian dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan pemabangunan dan pelaporan	Dokumen	1						

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup kesehatan dan sosial	tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pelaporan	Dokumen	1						
							Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup pemerintahan	tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pelaporan	Dokumen	1						
							Penyusunan rencana induk oengembangan kawasan pengobatan tradisional fisioterapi Cimande	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kawasan pengobatan tradisional fisioterapi cimande Kabupaten Bogor	Dokumen	1						
							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	TERSEDIANYA BAHAN PERENCANAAN SEKTOR PSDA	%	100						
							Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup ketahanan pangan dan pertanian	tersedianya bahan dokumen perencanaan lingkup sub bidang ketahanan pangan dan pertanian	Dokumen	4						
							Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup ketahanan pangan dan pertanian	Tersedianya bahan dokumen evaluasi perencanaan bidang ekonomi	Dokumen	4						
							penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata	Tersedianya sinergitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen	1						
							Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup penanaman modal kebudayaan dan pariwisata	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi lingkup penanaman modal kebudayaan dan pariwisata	Dokumen	1						
							Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Tersedianya perencanaan lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Bulan	12						
							Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Tersedianya dokumen laporan pengendalian dan evaluasi lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Bulan	12						
							Perencanaan peningkatan daya saing pariwisata	Tersedianya bahan dokumen perencanaan sektor pariwisata tingkat destinasi	Dokumen	1						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan perkebunan	Tersedianya bahan dokumen perencanaan tanaman perkebunan	Dokumen	1						
						Perencanaan peningkatan daya saing komoditas unggulan kecamatan sektor primer tingkat zona	Tersedianya bahan dokumen perencanaan komoditas unggulan tingkat zona	Dokumen	2						
						Perencanaan peningkatan daya saing komoditas unggulan kecamatan sektor sekunder dan tersier	Terwujudnya pelaksanaan daya saing unggulan kecamatan sektor sekunder dan primer	Dokumen	1						
						Penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kabupaten bogor tahun 2019-2023	Tersedianya dokumen rencana induk pembangunan dan ekonomi (RIPE)	Dokumen	1						
						Penyusunan rencana pengembangan destinasi pariwisata ekowisata di kabupaten bogor	Tersedianya pedoman dalam perencanaan pengembangan pariwisata tingkat destinasi di kabupaten bogor	Dokumen	1						
						Penyusunan dokumen panduan perencanaan lingkup perekonomian dan sumber daya alam	Tersedianya bahan dokumen perencanaan tanaman holtikultura	Dokumen	1						
						PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	TERSEDIANYA BAHAN PERENCANAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN WILAYAH	KEGIATAN	7						
						Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Tersedianya bahan analisis perencanaan sub bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Dokumen	29						
						Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Tersedianya bahan monitoring dan pengendalian sub bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Dokumen	48						
						Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup permukiman dan perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan lingkup sub bidang permukiman dan perumahan	Dokumen	46						
						Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup permukiman dan perumahan	Tersedianya bahan monitoring dan pengendalian sub bidang permukiman dan perumahan	Dokumen	45						

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup pengembangan wilayah	Tersedianya bahan analisis perencanaan sub bidang pengembangan wilayah	Kecamatan	40						
							Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup pengembangan wilayah	Tersedianya bahan monitoring dan pengendalian sub bidang pengembangan wilayah	Kecamatan	40						
							Pengembangan dan pengelolaan simpul jaringan kabupaten bogor	Terwujudnya perencanaan pemabngunan yang optimal di kabupaten berbasis data dan informasi yang handal	Dokumen	3						
							Pemutakhiran data dokumen rencana program onvestasi jangka menengah (RPIJM)	Terencananya program/kegiatan 5 tahunan bidang keciptakarya	Dokumen	2						
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JUMLAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KEGIATAN	6						
							Penguatan jaringan penelitian bidang peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan	Terbentuknya jejaring penelitian dan terjalinnya hubungan kerjsama antara perangkat daerah di kabupaten bogor dengan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) serta perguruan tinggi di jabodetabek	Perguruan Tinggi	15						
							Analisis IPM di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor	Meningkatnya nilai IPM 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor sebagai dasar perencanaan	Kecamatan	40						
							Analisis indikator Ekonomi Daerah	Terpenuhinya data dan informasi tentang indikator ekonomi daerah kabupaten bogor berupa PDRB Kabupaten, PDRB Kecamatan, PDRB Skala Usaha UMKM, LPE, IHK, NTP, Perbankan	Dokumen	1						
							Penyusunan Evaluasi pencapaian target sustainable Development Goals (SDG'S)	Dokumen evaluasi SDG's sebagai bahan pedoman perencanaan	Tahun Anggaran	1						
							Sosialisasi pembangunan dan pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Geopark, terjaganya kelestarian alam di Kabupaten Bogor	Kawasan Geopark	1						
							PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	JUMLAH INOVASI YANG DITERAPKAN OLEH MASYARAKAT	KEGIATAN	2						
							Gelar Inovasi Daerah	Terselenggaranya gelar inovasi daerah	Kategori	6						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Terpetakannya rencana aksi SIDa, potensi, jumlah inovasi, jenis, lokasi, dan daya dukung	Tahun Anggran	1						
						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	INDEKS KEPUASAN LAYANAN SEKRETARIAT	%	80						
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	jenis	4						
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah buku per-UU, surat kabar dan majalah yang tersedia	jenis	6						
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	4						
						Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah jamuan rapat rapat	kali	4000						
						Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	dokumen pengelolaan administrasi barang	dokumen	12						
						Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	jenis dan jumlah dokumen arsip yang di tata	dokumen	12						
						Pengelolaan Keamanan Kantor	jumlah petugas keamanan kantor	orang	8						
						Pengelolaan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	orang	16						
						Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	unit	14						
						Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor	Jumlah dokumen perencanaan Tim Komite Perencana Kabupaten Bogor	dokumen	3						
						Penerapan dan Pemeliharaan SMM ISO	dokumen legalitas Standar Sertifikat Internasional	dokumen	1						
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	unit	4						
						Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	2						
						Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis dan cetakan kantor yang tersedia	jenis	4						
						Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	9						
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	jumlah gedung yang dipelihara	gedung	1						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperlihara	unit	27						
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperlihara	jenis	3						
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		jenis	3						
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara	jaringan	1						
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultai ke dalam dan luar daerah	kali	150						
						Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	jumlah ahli daya pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	orang	29						
						Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian	kali	92						
						Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen	130						
						Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	jumlah peserta pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur	orang	10						
						Penyusunan Pelaporan Keuangan	jumlah hasil pelaporan keuangan daerah	dokumen	3						
						Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	dokumen	12						
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja perangkat daerah	dokumen	6						
						Penyusunan Perencanaan Anggaran	jumlah kegiatan perencanaan yang dilaksanakan perangkat daerah	dokumen	5						
						Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan tahunan dan laporan forum PD, penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten	dokumen	3						
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	jumlah kegiatan perencanaan perangkat daerah	kegiatan	5						
						Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah publikasi kinerja Bappedalitbang	kali	25						

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan pembangunan	%		100					
							Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen		5					
							Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen pendukung analisis perencanaan pembangunan yang disusun	Dokumen		1					
							Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen perencanaan dan pengelolaan TJSL Kabupaten Bogor	Dokumen		1					
							Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik yang Ditandatangani	Dokumen		1					
							Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Panduan Pelaksanaan Forum PD	Dokumen		1					
							Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD yang di tanda tangani	Dokumen		1					
							Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Panduan pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Dokumen		1					
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Dokumen		3					
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data indikator dalam dokumen perencanaan	%		100					
							Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Dokumen		1					
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi	Dokumen		1					
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	UnsurUrusa n		35					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2					
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		3					
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan aturan	%		100					
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		21					
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		3					
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Daerah Lingkup Pemerintahan	Dokumen		3					
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan	Perangkat Daerah		21					
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan	Dokumen		1					
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kesehatan dan Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		3					
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Kesehatan dan Sosial	Dokumen		3					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Kesehatan dan Sosial	Dokumen		3					
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pembangunan Manusia	Dokumen		1					
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Perangkat Daerah		7					
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Mengengan, Perdagangan dan Perindustrian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		3					
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Mengengan, Perdagangan dan Perindustrian	Dokumen		3					
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Mengengan, Perdagangan dan Perindustrian	Dokumen		21					
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perekonomian	Dokumen		6					
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		3					
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen		3					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen		21					
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen		1					
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perangkat Daerah		43					
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		9					
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dokumen		11					
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dokumen		21					
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Infrastruktur	Dokumen		3					
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		9					
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Kewilayahan	Dokumen		18					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Kewilayahan	Dokumen		21					
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayahan	Dokumen		3					
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	%		100					
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Dokumen kajian Bidang Sosial dan kependudukan	%		100					
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen kajian Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen		12					
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	%		100					
						Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen kajian Koperasi Usaha kecil dan menengah	Dokumen		6					
						Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen kajian Perindustrian dan perdagangan	Dokumen							
						Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen							
						Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Hidup	Dokumen							
						Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen kajian Penataan ruang dan pertanahan	Dokumen							
						Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen kajian Perhubungan	Dokumen							
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	%		100					

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah	Dokumen		3					
							Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikas dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah difusi inovasi dan penerapan teknologi	Inovasi		3					
							Diseminasi jenis, prosedur dan metoda penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Jumlah diseminasi inovasi Daerah	Dokumen		3					
							Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Laporan Diseminasi Hasil Penelitian dan pengembangan	Dokumen		3					
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100					
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen		7					
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen		4					
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah	Dokumen		3					
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD			3					
							Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen DPA Perangkat daerah	Dokumen		6					
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA Perangkat daerah	Dokumen		6					
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian kinerja PD	Dokumen		21					
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Dokumen		17					
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangam perangkat daerah	Dokumen		36					
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan Yang dibayarkan untuk ASN PD	Bulan		14					

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Perangkat Daerah	Laporan		12					
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kordinasi dan Pelporan Akuntansi PD	Laporan		12					
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Akhir Tahunan PD	Dokumen		1					
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan, Semesteran dan triwulan SKPD	Dokumen		17					
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis PD	Dokumen		2					
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah	Dokumen		6					
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah	Dokumen		6					
							pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian barang	Dokumen		1					
							rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen Rekon dan laporan barang	Dokumen		5					
							penataan barang milik daerah pada SKPD	dokumen laporan barang	Dokumen		2					
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertibnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100					
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Atribut Pegawai	Buah		150					
							Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Stel		150					
							Pendataan dan Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Dokumen pengelolaan pegawai	Dokumen		12					
							Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Laporan koordinasi Simpeg	Bulan		12					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Fasilitasi Kegiatan Monev Kinerja Pegawai	Bulan		36					
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai	Orang		9					
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali		2					
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kali		2					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan umum PD	Layanan		10					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jenis		7					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit		6					
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan kebersihan	Jenis		25					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor	Jenis		4					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak	Jenis		16					
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	Eksemplar		13520					
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan Makanan dan minuman	Porsi		7823					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan keluar Daerah	Kali		279					
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penataan Dokumen Arsip SKPD	Dokumen		12					
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE	Dokumen		1					
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang yang diadakan	Unit		8					
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit		5					
						Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Unit		36					
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Mesin lainnya	Unit		2					

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & prasarana gedung Kantor	Unit		6					
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & prasarana pendukung Bangunab Kanrtor	Unit		2					
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan	Layanan		24					
							Penyedia Jasa surat menyurat	Jumlah Benda pos	Jaringan		750					
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah Jaringan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	Paket		4					
							Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Orang		1					
							penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga tenaga Keamanan	Orang		28					
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang di pelihara	Jenis		30					
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan	Jumlah kendaraan Dinas yang di pelihara dan dibayar pajaknya	Unit		20					
							Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit		11					
							Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer,	Unit		125					
							pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor Rehab Gedung kantor Renovasi Ruang kerja Pemeliharaan taman yang terpelihara	M2		1120					
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terpelihara	Unit		80					
							Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit		6					

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan pembangunan	%			100				
							Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen			5				
							Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen pendukung analisis perencanaan pembangunan yang disusun	Dokumen			2				
							Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen perencanaan dan pengelolaan TJSL Kabupaten Bogor	Dokumen			2				
							Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik yang Ditandatangani	Dokumen			1				
							Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Panduan Pelaksanaan Forum PD	Dokumen			2				
							Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD yang di tanda tangani	Dokumen			2				
							Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Panduan pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Dokumen			2				
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Dokumen			4				
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan pada sistem aplikasi dan tersedianya dokumen data pokok	%			100				
							Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Dokumen			2				
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi	Dokumen			2				
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah dan Pembangunan Daerah	Urusan Unsur			3 5				

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			4				
							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen			5				
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan aturan	%			100				
							Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PD			21				
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			8				
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Daerah Lingkup Pemerintahan	Dokumen			6				
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan	PD			6				
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen			1				
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			10				
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen			9				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen			4				
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pembangunan Manusia	Dokumen			2				
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	PD			7				
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang perekonomian	Dokumen			13				
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup bidang perekonomian	Dokumen			14				
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian	Dokumen			24				
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Lingkup Bidang Perekonomian	Dokumen			11				
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen			6				
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen			5				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sumberdaya Alam	Dokumen			9				
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Bahan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Lingkup Bidang Sumber daya Alam	Dokumen			7				
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	PD			43				
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			8				
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur	Dokumen			8				
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur	Dokumen			8				
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen			5				
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			2				
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Kewilayahan	Dokumen			2				
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen			2				

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayahan	Dokumen			3				
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	%			100				
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Dokumen kajian Bidang Sosial dan kependudukan	%			100				
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen kajian Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen			9				
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	%			100				
							Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen kajian Koperasi Usaha kecil dan menengah	Dokumen			6				
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	%			100				
							Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah	Dokumen			2				
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	jumlah difusi inovasi dan penerapan teknologi	Inovasi			2				
							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan Diseminasi Hasil Penelitian dan pengembangan								
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen			14				
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			7				
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			2				

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			2				
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			3				
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			3				
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen			11				
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Dokumen			22				
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen			5				
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	Bulan			28				
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan			24				
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan			24				
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen			2				
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Dokumen			19				
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Barang Milik Daerah dengan Baik	Dokumen			6				
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			12				

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen			1				
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen			10				
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen			4				
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilayani	%			100				
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Buah			270				
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel			298				
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			24				
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan			12				
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan			49				
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			10				
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali			2				
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali			2				
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	Layanan			14				
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis			20				
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit			18				

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Unit			71				
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis			4				
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis			29				
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksemplar			25040				
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Porsi			11473				
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali			713				
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			24				
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			2				
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang yang diadakan	Unit			12				
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit			5				
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			36				
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			39				
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Mesin lainnya	Unit			2				
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			9				
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			8				
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan	Layanan			12				
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pcs			1462				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jaringan			9				
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			2				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang			56				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang di pelihara	Jenis			10				
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			45				
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit							
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer	Unit			183				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	M2			1652				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa Pemeliharaan AC	36			116				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	9			15				
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan pembangunan	%				100			
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen				5			
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen				4			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen				3			
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara				1			
						Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara				1			
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara				1			
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan				1			
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen				3			
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data indikator dalam dokumen perencanaan	%				100			
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang				152			
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Unsur				35			
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan				2			
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan				2			
						Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data indikator dalam dokumen perencanaan	%				100			
						Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen				1			

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan aturan	%				100			
							Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PD				21			
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				3			
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	PD				13			
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan				1			
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Dokumen				1			
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen				3			
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	PD				8			
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	PD				8			
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan				1			

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	PD				7			
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang perekonomian	Dokumen				3			
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	PD				4			
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	PD				4			
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan				4			
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen				3			
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	PD				3			
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	PD				3			
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan				4			

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	PD				43			
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				2			
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	PD				2			
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	PD				4			
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan				2			
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				2			
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD				40			
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD				40			
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan				2			

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	%				100			
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen				3			
							Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen				1			
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	%				100			
							Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen				1			
							Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen				1			
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	%				100			
							Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen				1			
							Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikas dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan				2			
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan				1			
							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan				3			

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%				100			
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen				17			
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				9			
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				1			
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				1			
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				1			
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				2			
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen				4			
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen				7			
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen				12			
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan				90			
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				12			
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	JumlahDokumenKoordinasidanPelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				12			
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Laporan				17			
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%				100			
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				6			
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				5			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				2			
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertibnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%				100			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen				12			
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen				12			
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				135			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				126			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan umum PD	Layanan				10			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				8			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				8			
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				24			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				4			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				3			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				50			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				264			
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen				12			
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen				2			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah/jenis barang yang diadakan	Unit				23			
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				2			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				3			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				10			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				7			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan	Layanan				8			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				2			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				12			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				12			
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang di pelihara	Jenis				10			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit				25			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				120			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				52			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				11			
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	%					100	100	100
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen					5	5	100
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen					2	2	100
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen					6	6	100
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara					1	1	100
						Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara					72	72	100
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara					2	2	100
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan					990	990	100

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen					4	4	100
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keterisian data dalam dokumen perencanaan	%					100	100	100
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang					544	544	100
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi sebagai bahan perencanaan perangkat daerah	Urusan Unsur					3 5	3 5	100
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan					2	2	100
							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan					2	2	100
							Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan data pada SIPD E-Walidata	Dokumen					2	2	100
							Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen Sistem Aplikasi					2	2	100
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan aturan	%							
							Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen					12	12	100
								Jumlah Dokumen bahanPengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen					10	10	100

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen					6	6	100
								Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan pembangunan Daerah dan perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PD					21	21	100
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					2	2	100
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah					13	13	100
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					7	7	100
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan					1	1	100
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					2	2	100
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah					8	8	100
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah					7	7	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					1	1	100
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen					12	12	100
							Jumlah Dokumen bahan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen					18	18	100
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen					8	8	100
							Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan pembangunan Daerah dan perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	PD					7	7	100
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					3	3	100
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah					4	4	100
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah					4	4	100
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan					2	2	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen					3	3	100
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah					3	3	100
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah					3	3	100
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan					2	2	100
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen					12	12	100
							Jumlah Dokumen bahan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen					2	2	100
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen					2	2	100
							Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan pembangunan Daerah dan perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	PD					44	44	100
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen					3	3	100

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah					4	4	100
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah					4	4	100
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Dokumen					3	3	100
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					3	3	100
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah					40	40	100
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah					40	40	100
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Dokumen					2	2	100
								Tingkat Kualitas Inovasi penelitian dan pengembangan daerah	%					100	100	100
								Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan	%					100	100	100
								Persentase Inovasi daerah yang difasilitasi Penerapannya	%					100	100	100

KODE							PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	%					100	100	100
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen kajian Bidang Sosial dan kependudukan yang menjadi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	%					100	100	100
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen					3	3	100
							Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen					1	1	100
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	%					100	100	100
							Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen					2	2	100
							Penelitian danPengembangan Kelautan danPerikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen					1	1	100
							Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen					1	1	100
							Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0					0	0	100
							Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0					0	0	100
							Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0					0	0	100
							Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0					0	0	100
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	Inovasi					255	255	100
							Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen					1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	laporan					1	1	100
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan					1	1	100
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan					1	1	100
						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan					1	1	100
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	%					100	100	100
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen					17	17	100
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					8	8	100
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1	1	100
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1	1	100
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1	1	100
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1	1	100
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen					6	6	100
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Laporan					17	17	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangam perangkat daerah	Dokumen					12	12	100
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JumlahOrangyangMenerimaGajidan Tunjangan ASN	bulan					14	14	100
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12	12	100
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					12	12	100
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	1	100
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Laporan					18	18	100
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Data Barang Milik Daerah	Dokumen					6	6	100
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1	1	100
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	1	100
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	1	100
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan sumber daya manusia aparatur	Dokumen					10	10	100
							Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	ASN					78	78	100
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					150	150	100
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					150	150	100
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					12	12	100
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen					12	12	100
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					9	9	100
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					135	135	100
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					100	100	100
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah	Dokumen					10	10	100
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					8	8	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					15	15	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket					4	4	100
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					4	4	100
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	3	100
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					6735	6735	100
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					7350	7350	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					440	440	100
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					12	12	100
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan yang di kelola	Paket					10	10	100
						Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	2	100
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					23	23	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					3	3	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					6	6	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3	3	100
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen					10	10	100
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lembar					800	800	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jaringan					4	4	100
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					3	3	100
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					2	2	100
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen					8	8	100
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					24	24	100
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					20	20	100
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					87	87	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					532	532	100
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit					47	47	100
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					9	9	100

Berdasarkan hasil realisasi capaian indikator program sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, pada Tahun 2024 dari 4 (empat) indikator program, seluruhnya mencapai target yang diharapkan, yaitu :

- (1) Tingkat ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan pembangunan, mencapai target 100%;
- (2) Tingkat kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan aturan, mencapai target 100%;
- (3) Persentasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah mencapai target 100%
- (4) Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, mencapai target 100%;

Dari 4 Program dan 19 kegiatan dan 87 Sub Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dapat digambarkan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan, antara lain:

A. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.237.358.351,00 (95,42%) dari total anggaran Rp.3.392.648.174,00, dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.394.111.916,00 (94,65%) dari total anggaran Rp.2.529.462.489,00 dan realisasi fisik 100,00%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.585.724.300,00 (94,25%) dari total anggaran Rp.621.458.045,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.474.651.268,00 (90,47%) dari total anggaran Rp.524.643.422,00 dengan realisasi fisik masih 100,00%;
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.37.170.500,00 (98,45%)

dari total anggaran Rp.37.755.062 dengan realisasi fisik masih 100,00%;

4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.48.455.500,00 (97,24%) dari total anggaran Rp. 49.833.127,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.453.811.234,00 (99,25%) dari total anggaran Rp.457.236.328,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.147.371.300,00 (95,03%) dari total anggaran Rp.155.072.007,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.646.927.814,00 (94,65%) dari total anggaran Rp.683.464.498,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp.341.918.025,00 (98,02%) dari total anggaran Rp.348.840.101,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.341.918.025,00 (98,02%) dari total anggaran Rp.348.840.101,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.317.146.626,00 (98,29%) dari total anggaran Rp.322.659.215,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.248.394.826,00 (98,72%) dari total anggaran Rp.251.628.187,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

4. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.68.751.800,00 (96,79%) dari total anggaran Rp.71.031.028,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

c. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.184.181.784,00 (96,08%) dari total anggaran Rp.191.686.369,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.184.181.784,00 (96,08%) dari total anggaran Rp.191.686.369,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

B. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 9.598.078.785,00 (99,03%) dari total anggaran Rp.9.692.540.716,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.127.924.134,00 (98,97%) dari total anggaran Rp.2.149.965.680,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp349.795.821,00 (98,30%) dari total anggaran Rp.355.832.489,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.29.616.000,00 (96,36%) dari total anggaran Rp.30.734.083,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Pemerintahan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.34.373.000,00 (97,21%) dari total anggaran Rp.35.359.630,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.100.846.500,00 (98,39%) dari total anggaran Rp.102.500.714,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.020.759.634,00 (99,41%) dari total anggaran Rp.1.026.828.650,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.34.911.000,00 (96,39%) dari total anggaran Rp.36.219.074,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.75.165.784,00 (98,75%) dari total anggaran Rp.76.118.454,00 dengan realisasi fisik 100%; dan
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.482.456.395,00 (99,19%) dari total anggaran Rp.486.372.586,00 dengan realisasi fisik 100%.

b. Analisis Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.765.878.065,00 (98,46%) dari total anggaran Rp.1.793.526.227,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.270.464.342,00 (97,87%) dari total anggaran Rp.276.353.595,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.57.239.900,00 (96,66%) dari total anggaran Rp.59.217.604,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.43.995.500,00 (96,18%) dari total anggaran Rp.45.740.847,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.036.176.655,00 (98,95%) dari total anggaran Rp.1.047.206.472,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.221.613.768,00 (98,94%) dari total anggaran Rp.223.987.999,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.61.947.400,00 (96,41%) dari total anggaran Rp.64.255.878,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.43.083.900,00 (97,31%) dari total anggaran Rp.44.275.914,00 dengan realisasi fisik 100%; dan
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.31.356.600,00 (96,52%) dari total anggaran Rp.32.487.918,00 dengan realisasi fisik 100%.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.5.704.276.586,00 (99,22%) dari total anggaran Rp.5.749.048.809,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.304.306.934,00 (99,23%) dari total anggaran Rp.1.314.483.180,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.35.700.000,00 (95,22%) dari total anggaran Rp.37.490.380,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.45.668.500,00 (98,75%) dari total anggaran Rp.46.248.529,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.356.341.200,00 (99,92%) dari total anggaran Rp.1.357.494.566,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.174.429.109,00 (95,70%) dari total anggaran Rp.182.271.598,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.63.453.784,00 (82,89%) dari total anggaran Rp.76.555.946,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.49.914.884,00 (98,72%) dari total anggaran Rp.50.564.069,00 dengan realisasi fisik 100%; dan
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.674.462.175,00 (99,65%) dari total anggaran Rp.2.683.940.541,00 dengan realisasi fisik 100%.

C. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.169.369.789,00 (98,96%) dari total anggaran Rp.3.202.656.210,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.98.127.000,00 (98,17%) dari total anggaran Rp.99.959.925,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.98.127.000,00 (98,17%) dari total anggaran Rp.99.959.925,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.490.363.000,00 (98,34%) dari total anggaran Rp.498.660.502,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.490.363.000,00 (98,34%) dari total anggaran Rp.498.660.502,00 dan realisasi fisik 100,00%;

c. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.097.973.984,00 (99,43%) dari total anggaran Rp.2.110.033.887,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.97.927.000,00 (97,97%) dari total anggaran Rp.99.959.925,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.98.127.000,00 (98,17%) dari total anggaran Rp.99.959.925,00 dengan realisasi fisik 100,00% ;

3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.148.811.784,00 (98,18%) dari total anggaran Rp.151.569.305,00 dengan realisasi fisik 100,00%; dan
4. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.753.108.200,00 (99,69%) dari total anggaran Rp.1.758.544.732,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.482.905.805,00 (97,75%) dari total anggaran Rp.494.001.896,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.358.840.705,00 (98,25%) dari total anggaran Rp.365.227.548,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.29.576.700,00 (97,38%) dari total anggaran Rp.30.371.436,00 dengan realisasi fisik 100,00% ;
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.57.048.500,00 (98,01%) dari total anggaran Rp.58.246.357,00 dengan realisasi fisik 100,00%; dan
4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.29.677.900,00 (98,12%) dari total anggaran Rp.30.247.542,00 dengan realisasi fisik 100,00%.
5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.726.000,00 (77,97%) dari total anggaran Rp.9.909.013,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

D. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp.26.773.181.877,00 (98,43%) dari total anggaran Rp.27.199.801.755,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.418.483.500,00 (96,79%) dari total anggaran Rp.432.346.530,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.118.684.675,00 (97,33%) dari total anggaran Rp.121.939.178,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.18.309.000,00 (90,56%) dari total anggaran Rp.20.217.447,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.17.354.000,00 (94,27%) dari total anggaran Rp.18.409.587,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.20.609,00 (93,74%) dari total anggaran Rp.21.984.744,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.16.533.100,00 (94,77%) dari total anggaran Rp.17.444.621,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.85.143.725,00 (95,83%) dari total anggaran Rp.88.848.929,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.141.850,00 (98,85%) dari total anggaran Rp.143.502.024,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.17.287.903.654,00 (98,63%) dari total anggaran Rp.17.528.351.138,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.17.204.815.984,00 (98,64%) dari total anggaran Rp.17.441.309.825,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.27.476.700,00 (94,97%) dari total anggaran Rp.28.931.352,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.233.070,00 (93,53%) dari total anggaran Rp.7.733.823,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.22.695.500,00 (97,30%) dari total anggaran Rp.23.326.121,00 dengan realisasi fisik 100,00%; dan
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.25.682.400,00 (94,94%) dari total anggaran Rp.27.050.017,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.23.222.600,00 (97,48%) dari total anggaran Rp.23.823.869,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.224.700,00 (98,01%) dari total anggaran Rp.7.371.534,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.8.764.400,00 (97,32%) dari total anggaran Rp.9.006.180,00 dengan realisasi fisik 100,00%; dan

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.233.500,00 (97,15%) dari total anggaran Rp.7.445.714,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.709.212.180,00 (95,94%) dari total anggaran Rp.739.239.869,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.15.400.100,00 (74,80%) dari total anggaran Rp.20.587.836,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.48.012.500,00 (98,12%) dari total anggaran Rp.48.932.467,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.123.335.100,00 (96,79%) dari total anggaran Rp.127.427.555,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Sosialisasi Peraturan Perundang Perundangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.15.162.900,00 (87,22%) dari total anggaran Rp.17.384.236,00 dengan realisasi fisik 100,00%; dan
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.507.301.580,00 (96,65%) dari total anggaran Rp.524.907.775,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 9 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.955.680.227,00 (96,72%) dari total anggaran Rp.2.021.978.961,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.115.577.000,00 (96,74%) dari total anggaran Rp.119.470.689,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.716.885.000,00 (96,44%) dari total anggaran Rp.743.358.568,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.148.666.500,00 (94,05%) dari total anggaran Rp.158.063.948,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.88.414.600,00 (97,15%) dari total anggaran Rp.91.005.960,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.162.349.800,00 (93,96%) dari total anggaran Rp.172.787.820,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Fasilitas Kunjungan Tamu. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.57.330.000,00 (82,78%) dari total anggaran Rp.69.255.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.505.934.877,00 (100,00%) dari total anggaran Rp.505.942.054,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.24.027.000,00 (97,09%) dari total anggaran Rp.24.747.396,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.136.495.450,00 (99,38%) dari total anggaran Rp.137.347.526,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.900.965.000,00 (98,69%) dari total anggaran Rp.912.910.327,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.188.160.000 (96,77%) dari total anggaran Rp.194.450.300,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.712.805.000,00 (99,21%) dari total anggaran Rp.718.460.027,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.867.624.280,00 (97,47%) dari total anggaran Rp.1.916.165.132,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.600.000,00 (100,00%) dari total anggaran Rp.5.600.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.782.982.830,00 (94,66%) dari total anggaran Rp.827.135.718,00 dengan realisasi fisik 100,00%; dan
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.079.041.450,00 (99,59%) dari total anggaran Rp.1.083.429.414,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.3.610.090.436,00 (99,59%) dari total anggaran Rp.3.624.986.370,00 dengan realisasi fisik 100,00%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.235.517.606,00 (95,64%) dari total anggaran Rp.246.255.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.132.708.000,00 (99,00%) dari total anggaran Rp.134.043.800,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.956.879.330,00 (100,00%) dari total anggaran Rp.2.956.879.330,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.38.911.700,00 (95,78%) dari total anggaran Rp.40.626.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.246.073.800,00 (99,55%) dari total anggaran Rp.247.182.240,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

Target capaian kinerja dan realisasi anggaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan IV TA 2024 Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

Analisis kinerja pelayanan Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor berupa pengkajian dan perbandingan target terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor.

Kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2025-2029, seiring dengan perubahan RPJMD Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, sehingga terdapat perbedaan pada Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja untuk Tahun 2020, Tahun 2021-2023 dan Tahun 2024.

Uraian Target Capaian, Realisasi, dan Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara lengkap dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100 %
	INDIKATOR TUJUAN								
	Nilai sakis sebagai komponen Perencanaan	%	23,6						
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	%		100	100	100			
	Nilai SAKIP	Poin					39,64	39,64	100
	INDIKATOR SASARAN								
	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100						
	Prosentase Difusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor	%	20						
	Prosentase Inovasi di Kabupaten Bogor	%	20						
	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%		100	100	100			
	Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diakomodir	%		100	100	100			
	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	Inovasi		166	221	249			
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin					23,81	23,81	100
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin					15,83	15,83	100
	Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kebijakan					0		
	Indeks Inovasi Daerah	Predikat					Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin					84,52		

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dapat merealisasikan Sasaran Strategis pertama yaitu Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Target. Hal ini berarti bahwa terjadi konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RKPD dengan RPJMD), dokumen perencanaan Perangkat Daerah konsisten dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (Renja dengan RKPD), dan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah konsistensi dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (Renstra PD dengan RPJMD) dengan Tingkat konsistensi 100 Persen.

Jika dibandingkan antara target dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2024, pencapaian Indikitor Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dengan kriteria penilaian dari sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan Berdampak Positif ke

Masyarakat” mendapatkan capaian sebanyak 39,64 poin dalam nilai SAKIP dengan realisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitupun dengan sasaran yang ke dua yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah yang Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah” mendapatkan capaian realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi dan sasaran yang ke tiga yaitu

Sedangkan pada sasaran ketiga yaitu “Hasil Riset dan Inovasi yang Bermanfaat” menunjukkan hasil capaian realisasi sebesar 100% dengan predikat Indeks Inovasi Daerah “Sangat Inovatif”.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2024 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah berlangsung cukup baik hal ini terbukti dari Pencapaian Kinerja dengan angka yang sangat tinggi yaitu 100% dengan realisasi keuangan secara keseluruhan sebesar 98,37%. Dengan uraian Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Target anggaran sebesar Rp.3.392.648.174 realisasi yang dicapai sebesar Rp.3.237.358.351 dengan Tingkat capaian Kinerja sebesar 95,42%, pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.9.692.540.716 dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.9.598.078.785 dengan Tingkat capaian sebesar 99,03%, untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp.3.202.656.210 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.169.369.789 dengan Tingkat capaian sebesar 98,96% dan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran Rp. 27.199.801.755 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.773.181.877 dengan Tingkat capaian sebesar 98,43%.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Setiap Perangkat Daerah pada umumnya mempunyai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya, namun sebagaimana umumnya yang terjadi di Pemerintah Daerah di berbagai wilayah maka terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya diantaranya:

NO.	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Implementasi penyelenggaraan perencanaan yang holistik dan terintegrasi belum terlaksana secara optimal	Keterbatasan kompetensi SDM perencana dan kelitbangan	Pengembangan aplikasi yang terintegrasi (Simral dan SIPD)
2.	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung yang valid dan akurat	Motivasi kerja yang kuat dengan tata kerja yang sistemik dan terjadwal
3.	Hasil penelitian dan pengembangan belum dijadikan dasar perumusan kebijakan	Rekomendasi dari hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah	Rencana pengembangan Forum Satu Data
		Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi diantara seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat).	Tersedianya sistem manajemen internal Bappedalitbang
			Keberadaan mitra kelitbangan dan perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam perumusan rekomendasi kebijakan

Masalah pokok dalam pelaksanaan Penilaian AKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan hasil dari evaluasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh nilai sebesar 21.50 atau 86% dari nilai maksimum sebesar 25.00. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kienrja internal, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam evaluasi internal yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor memperoleh nilai sebesar 77,30 atau dengan predikat BB. Sedangkan pada Tahun 2023 nilai AKIP yang diperoleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor memperoleh nilai sebesar 77,50.

Hambatan dari faktor internal yang berpengaruh terhadap masalah tersebut diatas disebabkan antara lain oleh :

1. Belum Optimalnya Koordinasi antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

2. Keterbatasan Kompetensi SDM Perencana dan Peneliti
3. Belum optimalnya pengelolaan data yang terstruktur dan sistematis.
4. Belum optimalnya pengkoordinasian Program prioritas pembangunan daerah.
5. Belum sepenuhnya perencanaan pembangunan berbasis kebijakan penataan ruang.
6. Belum optimalnya mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Inovasi yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi antar perangkat daerah, serta masih kurangnya pemahaman operator atau inovator di perangkat daerah terhadap inovasi daerah.

Adapun hambatan dari faktor eksternal yang berpengaruh terhadap masalah tersebut diatas disebabkan :

1. Belum terbangunnya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah.
2. Suplai data dari Perangkat Daerah belum maksimal.
3. Masih terdapat Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan dokumen perencanaan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, telah dianalisa tantangan dan peluang dalam peningkatan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang disajikan dalam Tabel berikut:

No	Tantangan	Peluang Pengembangan
1.	Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan;	Kewenangan dan peran Bappedalitbang Kabupaten Bogor yang masih kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
2.	Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan);	Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Bappedalitbang Kabupaten Bogor lebih efektif dan efisien;

No	Tantangan	Peluang Pengembangan
3.	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan Perangkat Daerah lain yang seringkali menyebabkan belum terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappedalitbang Kabupaten Bogor;
4.	Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;	Tuntutan stakeholder akan produk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif;
5.	Rendahnya pemahaman dan animo Perangkat Daerah dalam memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan di masa mendatang.	Sudah tersedianya system informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
6.	Perlunya penyusunan ulang target dan indikator kinerja agar dapat lebih terukur dan memancing tumbuhnya inovasi dalam bidang perencanaan;	Kepercayaan Kepala Daerah kepada Bappedalitbang Kabupaten Bogor sebagai Lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
7.	Perlunya penambahan dan peningkatan kapasitas aparatur Bappedalitbang Kabupaten Bogor baik secara kualitas maupun secara kuantitas.	Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas.

2.3.4 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Sesuai dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Bogor No 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang terdiri atas urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dalam penyusunan Rencana Strategis 2018-2023 dikaji permasalahan-permasalahan dari setiap permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	Implementasi penyelenggaraan perencanaan yang holistik dan terintegrasi belum terlaksana secara optimal	1. Perencanaan pembangunan masih parsial 2. Belum efektifnya koordinasi antar bidang perencanaan 3. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah, antar urusan pemerintahan 4. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah, baik di kabupaten dengan provinsi, maupun dengan nasional 5. Belum optimalnya kompetensi SDM di bidang perencanaan, baik di Bappedalitbang, maupun di perangkat daerah teknis lainnya dan kecamatan	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dengan tahunan (RKPD);	Penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu Penguatan Jaringan Penelitian Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah	Merumuskan/ menyusun dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai tahapan Kerjasama Penelitian

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
2		Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	1. Belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Belum memadainya data dan informasi perencanaan pembangunan 3. Belum tersedia mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) dengan sistem informasi data serta monev dan pelaporan	Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3		Hasil penelitian dan pengembangan belum dijadikan dasar perumusan kebijakan	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah 2. Belum terkoordinasinya, sinkronisasi dan integrasi program-program kelitbangan antar OPD 3. Belum optimalnya kemitraan/ jejaring penelitian 4. Belum berkembangnya inovasi dalam mendukung daya saing daerah 5. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kelitbangan di Pemkab Bogor	Penelitian dan Pengembangan yang lebih implementatif Optimalisasi kemitraan/jejaring penelitian dan inovasi Peningkatan kapasitas SDM perencana dan kelitbangan	Peningkatan kualitas dan Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah	Melaksanakan pengkajian dan Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah Fasilitasi dan Pelaksanaan inovasi daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses review ini dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan program/kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD atau belum. Dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan RKPD.

Hasil review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 terkait Bappedalitbang adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 telah sesuai dengan kebutuhan Bappedalitbang untuk Tahun Anggaran 2025, kecuali dalam hal anggaran, terdapat penurunan pagu anggaran yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dituangkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

NO	RANCANGAN AWAL RENJA		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	10	11	12	13	14
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					37.147.645.783	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapperida	Nilai AKIP	Predikat	BB	27.255.279.924	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	494.338.681	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	245.226.412	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	22.669.530	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	14.631.299	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	15.660.047	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	11.914.907	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	32.662.034	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	143.880.927	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	7.693.525	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	%	100	19.635.580.161	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapperida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	76/14	19.508.449.254	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	28.468.809	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	15.562.035	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	16.982.945	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	98.662.098	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100	24.076.633	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bapperida	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	5.592.792	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.680.934	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	12.802.907	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapperida	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	%	100	443.783.533	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bapperida	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	3	28.142.553	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapperida	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	83.558.363	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bapperida	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	17.238.996	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapperida	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	29.584.277	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapperida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	149.540.305	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapperida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	-	27.004.056	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapperida	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	108.714.983	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	10	11	12	13	14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan	%	100	1.745.102.127	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	143.458.763	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	609.463.393	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	231.490.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	143.213.427	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapperida	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	105.215.116	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapperida	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	65	43.902.244	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	399.136.108	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	20.518.517	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	48.703.959	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapperida	Pengelolaan barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah	%	100	1.306.871.093	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapperida	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	658.806.238	
	Pengadaan Mebel	Bapperida	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	35	260.030.616	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapperida	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	134.879.294	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	102.027.840	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	101.127.105	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	%	100	2.211.287.936	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.000	8.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	861.449.520	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	10.235.088	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	32	1.331.003.328	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi di bagi jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100%	%	100	1.361.694.780	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	166.995.000	
	Pemeliharaan Mebel	Bapperida	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	22	29.934.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapperida	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	100.602.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	689.210.633	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	85.955.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	288.997.547	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	2.061.439.881	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bapperida	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Skala	3	1.078.449.656	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	10	11	12	13	14
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	5	187.640.096	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bapperida	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	304.322.812	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bapperida	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	40.784.829	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	21.884.319	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	285.218.991	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bapperida	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	990	85.578.761	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	5	153.019.848	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	90	718.202.301	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	598.467.469	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	554	119.734.832	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	40	160.357.603	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	107.615.935	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	52.741.668	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bapperida	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Pada SIPD	%	60	104.430.321	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	10	11	12	13	14
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	3	104.430.321	
		Bapperida					
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%		4.517.471.259	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapperida	Persentase Ketercapaian target strategis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		1.330.761.647	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	194.999.916	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	62.499.985	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	67.499.801	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	76.443.250	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	214.383.705	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	84.989.587	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	129.953.278	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	10	11	12	13	14
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	499.992.125	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapperida	Persentase Ketercapaian target strategis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		1.130.444.684	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	225.448.441	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	48.998.517	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	80.998.711	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	303.999.606	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	284.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	52.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	53.999.675	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	80.999.734	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bapperida	Persentase Ketercapaian target strategis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		2.056.264.928	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	10	11	12	13	14
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	132.674.575	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	215.290.102	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	62.140.313	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	398.603.029	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	238.460.220	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	65.035.261	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	71.794.591	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	872.266.837	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Bapperida					
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Bapperida	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	Kebijakan		3.313.454.719	
			Predikat hasil inovasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat			
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Bapperida	Persentase bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	%	14,29	1.319.999.660	
			Karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublish	%			

NO	RANCANGAN AWAL RENJA		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	10	11	12	13	14
			karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar	%			
	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Bapperida	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	9	1.319.999.660	
	Invensi dan Inovasi	Bapperida	Nilai Predikat Invensi dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	1.993.455.059	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	99.996.828	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan	1	999.000.273	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	1	119.999.959	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan	1	99.999.994	
	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Bapperida	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan	1	124.999.745	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan	1	99.999.609	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	449.458.651	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat diuraikan sebagai hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, seperti perangkat daerah perbatasan, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Namun untuk Bappedalitbang Kabupaten Bogor tidak ada usulan dari masyarakat yang terkait langsung program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Bappedalitbang Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bogor

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapperida	Nilai AKIP	88	Predikat	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	100	%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	100	%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapperida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	100	%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bapperida	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapperida	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	100	%	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bapperida	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1160	Unit	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapperida	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bapperida	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapperida	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapperida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapperida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135	Orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapperida	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan	100	%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapperida	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapperida	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bapperida	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapperida	Pengelolaan barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah	100	%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapperida	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	Unit	
	Pengadaan Mebel	Bapperida	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapperida	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	100	%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi di bagi jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100%	100	%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	
	Pemeliharaan Mebel	Bapperida	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapperida	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121	Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	
		Bapperida				
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida	Nilai rata-rata Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	%	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bapperida	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	Dokumen	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bapperida	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	Dokumen	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bapperida	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bapperida	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	40	Usulan	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	Dokumen	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	10	%	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dokumen	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	511	Orang	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	84	%	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Dokumen	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Dokumen	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bapperida	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Pada SIPD	100	%	
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3	Dokumen	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PDLingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	81	%	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	81		
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	81		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapperida	Persentase Ketercapaian target strategis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	83	%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	Laporan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5	Laporan	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	Laporan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	Laporan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	Laporan	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapperida	Persentase Ketercapaian target strategis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	83	%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	Laporan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	Laporan	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Laporan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	Laporan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	Laporan	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3	Laporan	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bapperida	Persentase Ketercapaian target strategis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	83	%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	2	Dokumen	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	Laporan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	Laporan	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Laporan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	Laporan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	Laporan	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3	Laporan	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Bapperida	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	7	Kebijakan	
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		Persentase bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	100	%	
		Bapperida	Karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublish	100	%	
			karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar	100	%	
	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Bapperida	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	7	Naskah	
	Invensi dan Inovasi	Bapperida	Nilai Predikat Invensi dan Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Predikat	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1	Laporan	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	1	Laporan	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1	Laporan	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1	Laporan	
	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Bapperida	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1	Kegiatan	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan	1	Laporan	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.		praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Bapperida	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1	Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Kementerian atau Lembaga terkait merupakan cara untuk melaksanakan proses keselarasan perencanaan antara Tingkat Kabupaten/kota, Provinsi maupun Nasional. Hal ini merupakan salah satu factor kunci keberhasilan perencanaan Pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilakukan telaahan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indicator tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas RI.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas RI menjadi actor utama yang Menyusun program Pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas RI 2020-2024: “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan Kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong”.

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan Pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional mensinkronisasi kegiatan Tahun 2024-2025 ada delapan Agenda Pembangunan yang dituangkan ke dalam Prioritas Nasional Tahun 2024-2025 yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,

- Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	%	2.121.466.905
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 3. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	%	2.121.466.905
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi dalam Penyusunan Kebijakan Daerah yang tersusun	1. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan 2. Predikat hasil inovasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	25 Sangat Inovatif	% Predikat	3.314.458.984

Telaahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang terhadap kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat ada 3 program yang menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Program Kegiatan Dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	%	2.121.466.905
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 3. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	%	2.121.466.905
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi dalam Penyusunan Kebijakan Daerah yang tersusun	1. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan 2. Predikat hasil inovasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	25 Sangat Inovatif	% Predikat	3.314.458.984

Tabel 3.3
Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG Mendukung	PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	- Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangun Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah - Bidang Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Sekretariat

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sehingga program dan kegiatan yang akan di capai dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor sesuai pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 adalah “**Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas**” dengan Indikator Tujuan “**Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dan Indeks Inovasi Daerah**” dengan Sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- Dengan indikator sasaran atau IKU yang akan di capai adalah:
- Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan Target 100%)
2. Hasil Riset dan Inovasi yang implementatif
- Dengan Indikator sasaran atau IKU yang akan dicapai adalah:
- Persentase Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaran Pemerintah Daerah (dengan target 100%)

- Tingkat Capaian Inovasi Daerah (dengan target predikat Sangat Inovatif).

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Nilai IPPD = Nilai Rata-rata, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RENSTRA, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RKPD, dan Keselarasan RKPD terhadap RENJA Komponen Sinergi (32 Poin) Komponen Kualitas Perencanaan (58 Poin) Komponen Keterhubungan Perencanaan Kinerja (10 Poin) Rentang Nilai: 91-100= Sangat Baik 81-90= Baik 71-80= Cukup Baik 61-70= Kurang <60= Sangat Kurang	89	Poin

		Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Nilai Indeks Riset dan Inovasi Daerah = Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (50%) ditambah Nilai Indeks Inovasi Daerah (50%) / IRID = (0,50 x IKK) + (0,50 x IID) Sangat Baik = 76-100 Baik = 61-75 Cukup = 45-60 Kurang = <45 Kurang = <50	Sangat Baik	Predikat
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai IPPD = Nilai Rata-rata, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RENSTRA, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RKPD, dan Keselarasan RKPD terhadap RENJA	89	Poin
Hasil Riset dan Inovasi yang Menjadi dasar Kebijakan		Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil Riset dan Inovasi daerah pada tahun berkenaan dibagi jumlah Hasil riset dan Inovasi daerah yang dihasilkan lingkup Perangkat Daerah	64.86	%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor didasarkan pada beberapa faktor diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2026 mencakup 4 Program dengan 17 Kegiatan dan 93 Sub Kegiatan adalah sebagaimana terlampir pada tabel 3.5.

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Sekretariat	1	8	49	27.255.279.924
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1	4	12	2.061.439.881
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	1	8	1.330.761.647
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		1	8	1.130.444.684
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1	8	2.056.264.928
Bidang Riset dan Inovasi Daerah	1	2	8	3.313.454.719
Jumlah Anggaran				37.147.645.783

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Struktur APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 wajib mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 sudah menggunakan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta indikator Kinerja berdasarkan hasil pemetaan (mapping) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2026 mempunyai 4 Program, 17 Kegiatan dan 93 Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.147.645.783,- dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Predikat	BB	26.172.811.613,00	Bappedarida	APBD	BB	25.183.687.217,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	494.338.681,00	Bappedarida	APBD	BB	826.898.911,80
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	245.226.412,00	Bappedarida	APBD	8	332.948.071,30
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	22.669.530,00	Bappedarida	APBD	1	44.175.259,35
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	14.631.299,00	Bappedarida	APBD	1	31.017.787,35
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	15.660.047,00	Bappedarida	APBD	1	42.985.008,20
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	11.914.907,00	Bappedarida	APBD	1	52.673.759,35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	32.662.034,00	Bappedarida	APBD	5	103.253.732,10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	143.880.927,00	Bappedarida	APBD	5	207.288.990,40
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	7.693.525,00	Bappedarida	APBD	1	12.556.303,75
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	%	100	18.671.631.496,00	Bappedarida	APBD	100	21.794.586.635,90
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	18.512.461.240,00	Bappedarida	APBD	14	21.559.369.619,50

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	28.752.220,00	Bappedarida	APBD	12	47.001.880,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	15.550.462,00	Bappedarida	APBD	1	29.051.768,05
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	16.126.276,00	Bappedarida	APBD	1	26.430.157,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	98.741.298,00	Bappedarida	APBD	2	132.733.210,45
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100	24.076.633,00	Bappedarida	APBD	100	51.064.002,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	5.592.792,00	Bappedarida	APBD	2	17.940.000,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.680.934,00	Bappedarida	APBD	1	14.467.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	12.802.907,00	Bappedarida	APBD	4	18.657.002,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	%	100	443.783.533,00	Bappedarida	APBD	100	696.774.302,70
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1160	28.142.553,00	Bappedarida	APBD	1160	32.363.300,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	83.558.363,00	Bappedarida	APBD	3	140.916.648,40
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	17.238.996,00	Bappedarida	APBD	12	32.871.348,15
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	Bappedarida	APBD	12	38.692.403,20

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	29.584.277,00	Bappedarida	APBD	12	120.306.585,30
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	149.540.305,00	Bappedarida	APBD	10	53.010.626,55
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	135	27.004.056,00	Bappedarida	APBD	135	40.049.856,30
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	27	108.714.983,00	Bappedarida	APBD	27	238.563.534,80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan	%	100	1.745.102.145,00	Bappedarida	APBD	100	2.522.180.981
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	143.458.763,00	Bappedarida	APBD	4	100.200.559,15
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	609.463.393,00	Bappedarida	APBD	2	214.587.024,95
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	231.490.600,00	Bappedarida	APBD	2	491.686.015,55
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	143.213.427,00	Bappedarida	APBD	4	720.551.880,95
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	105.215.134,00	Bappedarida	APBD	4	177.569.899,20
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	43.902.244,00	Bappedarida	APBD	12	187.778.525,10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	399.136.108,00	Bappedarida	APBD	12	517.965.290,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	20.518.517,00	Bappedarida	APBD	4	32.450.358,45
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	48.703.959,00	Bappedarida	APBD	1	79.391.427,60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengelolaan barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah	%	100	1.220.896.409,00	Bappedarida	APBD	100	2.103.589.576

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	50.000.000,00	Bappedarida	APBD	1	792.127.173,70
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	658.806.238,00	Bappedarida	APBD	7	747.500.000,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	260.030.616,00	Bappedarida	APBD	1	362.317.687,85
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	48.904.610,00	Bappedarida	APBD	1	45.811.655,30
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	102.027.840,00	Bappedarida	APBD	10	52.953.172,55
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	101.127.105,00	Bappedarida	APBD	5	102.879.886,65
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	%	100	2.211.287.936,00	Bappedarida	APBD	100	2.579.349.937
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	560	8.600.000,00	Bappedarida	APBD	560	11.780.138,85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	861.449.520,00	Bappedarida	APBD	12	1.026.548.237
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	10.235.088,00	Bappedarida	APBD	1	40.250.575,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.331.003.328,00	Bappedarida	APBD	12	1.500.770.986
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi di bagi jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100%	%	100	1.361.694.780,00	Bappedarida	APBD	100	2.230.604.927
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	166.995.000,00	Bappedarida	APBD	20	302.214.214

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	0	Bappedarida	APBD	-	34.424.185
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	121	100.602.600,00	Bappedarida	APBD	121	142.935.634,40
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	689.210.633,00	Bappedarida	APBD	1	1.482.828.898
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	70	85.955.000,00	Bappedarida	APBD	70	198.403.732
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	288.997.547,00	Bappedarida	APBD	2	69.798.263
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	2.121.466.905,00	Bappedarida	APBD	100	5.461.254.545
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	1.138.449.656,00	Bappedarida	APBD	100	3.354.283.578
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	187.646.421,00	Bappedarida	APBD	3	575.000.000
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	1	342.783.599,00	Bappedarida	APBD	1	674.783.578
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	37.074.570,00	Bappedarida	APBD	1	92.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	20.399.739,00	Bappedarida	APBD	1	115.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	209.455.935,00	Bappedarida	APBD	1	690.000.000
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	40	85.579.210,00	Bappedarida	APBD	40	287.500.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	255.510.182,00	Bappedarida	APBD	3	920.000.000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	100	718.226.033,00	Bappedarida	APBD	100	1.067.712.836
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2	598.476.250,00	Bappedarida	APBD	2	690.000.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	511	119.749.783,00	Bappedarida	APBD	511	377.712.836
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	81	160.357.672,00	Bappedarida	APBD	82	579.258.131
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	107.615.970,00	Bappedarida	APBD	2	241.357.539
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	52.741.702,00	Bappedarida	APBD	2	337.900.592
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Pada SIPD	%	60	104.433.544,00	Bappedarida	APBD	100	460.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	3	104.433.544,00	Bappedarida	APBD	3	460.000.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	81	4.511.347.160,00	Bappedarida	APBD	82	7.865.439.719
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketercapaian target strategis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	83	1.330.449.053,00	Bappedarida	APBD	84	2.673.750.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	185.000.000,00	Bappedarida	APBD	2	316.250.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	85.000.000,00	Bappedarida	APBD	2	201.250.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	55.000.000,00	Bappedarida	APBD	5	115.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	76.449.053,00	Bappedarida	APBD	3	316.250.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	214.000.000,00	Bappedarida	APBD	2	316.250.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	85.000.000,00	Bappedarida	APBD	3	201.250.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	130.000.000,00	Bappedarida	APBD	5	488.750.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	500.000.000,00	Bappedarida	APBD	3	718.750.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	83	1.130.449.053,00	Bappedarida	APBD	84	1.743.008.020
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	225.449.053,00	Bappedarida	APBD	2	330.762.032
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	49.000.000,00	Bappedarida	APBD	2	53.924.737

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Bidang Perekonomian								
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	81.000.000,00	Bappedarida	APBD	5	106.835.055
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	3	304.000.000,00	Bappedarida	APBD	3	575.286.196
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	284.000.000,00	Bappedarida	APBD	2	239.775.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	52.000.000,00	Bappedarida	APBD	3	150.075.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	54.000.000,00	Bappedarida	APBD	5	76.475.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	3	81.000.000,00	Bappedarida	APBD	3	209.875.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian target strategis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	83	2.050.449.054,00	Bappedarida	APBD	84	3.795.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	132.676.087,00	Bappedarida	APBD	2	460.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	215.290.327,00	Bappedarida	APBD	2	287.500.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	5	62.147.445,00	Bappedarida	APBD	5	57.500.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	398.668.321,00	Bappedarida	APBD	3	690.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	238.461.287,00	Bappedarida	APBD	2	701.500.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3	65.036.693,00	Bappedarida	APBD	3	460.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	70.576.673,00	Bappedarida	APBD	4	506.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	3	867.592.221,00	Bappedarida	APBD	3	632.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					Bappedarida	APBD		
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	Rekomendasi	7	3.314.458.984,00	Bappedarida	APBD	7	3.912.832.401
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	%	100	1.320.000.000,00	Bappedarida	APBD	100	2.534.339.735
		Karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublish	%	100		Bappedarida	APBD	100	
		karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar	%	100		Bappedarida	APBD	100	
	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	7	1.320.000.000,00	Bappedarida	APBD		2.534.339.735
	Invensi dan Inovasi	Nilai Predikat Invensi dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	1.994.458.984,00	Bappedarida	APBD	Sangat Inovatif	1.378.492.665
	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	100.000.000,00	Bappedarida	APBD	1	251.591.114,30
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan	1	1.000.000.000,00	Bappedarida	APBD	1	143.098.481,30
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	1	120.000.000,00	Bappedarida	APBD	1	72.558.856,70
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan	1	100.000.000,00	Bappedarida	APBD	1	134.548.945,45
	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan	1	125.000.000,00	Bappedarida	APBD	1	59.799.653,85

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	penelitian lainnya di daerah								
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan	1	100.000.000,00	Bappedarida	APBD	1	212.749.865,45
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	449.458.984,00	Bappedarida	APBD	1	504.145.748,05

BAB V PENUTUP

Demikian Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029, maka Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.

The image shows the official seal of the Mayor of Bogor, which is a circular emblem containing the Garuda Pancasila and the text "BUPATI BOGOR". Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "RUDY SUSMANTO" is printed in capital letters.

BUPATI BOGOR,
RUDY SUSMANTO

BAB V

PENUTUP

Demikian Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029, maka Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.

 **BUPATI BOGOR,**
RUDY SUSMANTO